



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN PLT. DIRJEN
INDUSTRI AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DAN ASOSIASI-
ASOSIASI**

**(BIDANG PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, UMKM, EKONOMI KREATIF,
DAN SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 9
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	: Selasa, 11 November 2025
Pukul	: 14.00 – 18.25 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Evita Nursanty, M.Sc.(Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PDIP)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 16 orang dari 41 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI; 2. Asosiasi – Asosiasi Kementerian Perindustrian RI: • Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) • Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) • Dewan Atsiri Indonesia (DAI) • Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) • Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) • Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) • Rumah Sawit Indonesia (RSI) • Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) • Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) • Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada pukul 14.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari Selasa, 11 November 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PDIP).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Plt. Direktur Jenderal Industri Agro mengenai kinerja subsektor industri agro tahun 2023 sampai dengan Semester I 2025, profil, tantangan, dan upaya peningkatan daya saing sektor industri agro nasional.
2. Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dari asosiasi-asosiasi subsektor industri agro antara lain:
 - a. Industri *pulp* dan kertas nasional menghadapi tekanan akibat tingginya impor, lemahnya regulasi ekspor-impor, keterbatasan bahan baku dan energi, serta kondisi perdagangan internasional yang kurang kondusif.
 - b. Menurunnya industri perkebunan karet dikarenakan harga karet alam yang terus melemah dan *shifting* lahan dari perkebunan karet menjadi lahan perkebunan sawit dan jenis lain.
 - c. Melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan bahan baku karet untuk kebutuhan lain.
 - d. Industri atsiri Indonesia dinilai masih perlu pengembangan dalam hal struktur hilirisasi, inovasi produk, penetrasi pasar, penguatan SDM dan rantai pasok.
 - e. Kinerja industri makanan dan minuman masih terjaga dengan baik, namun bahan baku produk makanan dan minuman belum sepenuhnya dapat dipasok dari dalam negeri sehingga masih ada ketergantungan impor untuk bahan baku spesifik.
 - f. Industri minyak goreng Indonesia menghadapi tantangan konsumsi masyarakat yang menurun, penolakan generasi muda terhadap produk berlabel *crude*, dan adanya kendala akibat tingginya emisi karbon.
 - g. Belum optimalnya pemanfaatan keunggulan geografis produksi sawit sehingga menyebabkan harga ekspor Indonesia kurang kompetitif di pasar global.
 - h. Industri pengolahan ikan di Indonesia menghadapi tantangan berupa kekurangan bahan baku pada musim tertentu, tingginya harga bahan baku dibandingkan negara pesaing, minimnya fasilitas laboratorium pengujian Cs-137, serta perlunya penguatan citra positif di pasar global khususnya pasca kasus Cs-137.
 - i. Perkebunan sawit menghadapi tantangan akibat belum jelasnya dan tumpang tindihnya regulasi antar instansi pemerintah, seperti Kementerian

- Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Investasi/BKPM .
- j. Industri minuman ringan menghadapi berbagai tantangan sehingga perlunya dukungan dalam reformulasi produk rendah gula dan kalori, salah satunya dengan penggunaan pemanis rendah atau tanpa kalori. Perlu sinkronisasi kebijakan sehingga regulasi berdasarkan data terkini dan melibatkan pelaku usaha.
 - k. Industri kopi menghadapi tantangan akibat banyaknya penanaman modal asing yang membeli langsung komoditas hasil pertanian, sehingga menimbulkan kesulitan pelaku usaha lokal dalam memperoleh bahan baku.
 - l. Industri hasil tembakau membutuhkan *roadmap* yang komprehensif dan seimbang untuk menjamin kepastian berusaha.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
- a. Memastikan kebijakan dan regulasi pemerintah bersifat mendukung dan tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan serta keberlanjutan industri nasional.
 - b. Turut serta untuk menekan peredaran rokok ilegal guna mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau nasional.
 - c. Mendorong program hilirisasi industri kopi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kopi Indonesia.
 - d. Mengoptimalkan peran asosiasi industri dalam pembinaan petani lokal untuk mendorong *business matching* dan memperkuat rantai pasok.
 - e. Mendorong program *agro-upgrading* yang terintegrasi dari sektor pembiayaan hingga penguatan produk.
 - f. Melaksanakan penyusunan *roadmap* industri agro serta optimalisasi program untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam *roadmap* tersebut.
 - g. Memfasilitasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk membangun satu pelayanan terpadu bagi masyarakat industri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.25 WIB.

**Plt. DIRJEN INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,**

TTD

PUTU JULI ARDIKA

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT,**

TTD

Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.

